

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### 2.1. Deskripsi Umum Kota Batam

##### 2.1.1. Letak Geografis Kota Batam

Gambar 2.1. Peta Kota Batam



Sumber: Batam (2018)

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional.

Kota Batam berdasarkan Perda (2004) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara: -  
0°25' 29" LU -1°15'00" LU - 103°34' 35" BT -104°26'04"BT.

Berdasarkan RTRW Kota Batam 2004-2014, Luas wilayah Kota Batam 3.990,00 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara. Kota Batam berbatasan dengan:

- Utara : Selat Singapura
- Selatan : Kecamatan Senayang
- Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun
- Timur : Kecamatan Bintan Utara

Berdasarkan pada Perda (2005) terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan di Kota Batam antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Nama, Luas Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Kelurahan**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km2)</b>
<b>1</b>	<b>Belakang Padang</b>		69120
		1. Pulau Terong	5791
		2. Pecong	1382
		3. Kasu	50637
		4. Pemping	4249
		5. Tanjung Sari	2041
		6. Sekanak Raya	5020
<b>2</b>	<b>Bulang</b>		158753
		1. Pantai Gelam	25853
		2. Temoyong	5351
		3. Pulau Setokok	24886
		4. Batu Legong	49775
		5. Bulang Lintang	50697
		6. Pulau Buluh	2187
<b>3</b>	<b>Galang</b>		350764
		1. Pulau Abang	28612
		2. Karas	50449
		3. Sijantung	39610
		4. Sembulang	65834
		5. Rempang Cate	91523
		6. Subang Mas	20254
		7. Galang Baru	50287
		8. Air Raja	4191
<b>4</b>	<b>Sei Beduk</b>		106447
		1. Tanjung Piayu	28595
		2. Duriangkang	11273
		3. Mangsang	9999
		4. Mukakuning	56581
<b>5</b>	<b>Nongsa</b>		114546
		1. Ngenang	19546
		2. Kabil	25915
		3. Batu Besar	41009
		4. Sambau	28074
<b>6</b>	<b>Sekupang</b>		68302
		1. Tanjung Riau	23902
		2. Tiban Baru	3886

		3. Tiban Lama	14094
		4. Tiban Indah	5936
		5. Patam Lestari	6159
		6. Sungai Harapan	3325
		7. Tanjung Pinggir	10999
<b>7</b>	Lubuk Baja		11426
		1. Batu Selicin	1331
		2. Lubuk Baja Kota	1459
		3. Kampung Pelita	1393
		4. Baloi Indah	3519
		5. Tanjung Uma	3724
<b>8</b>	Batu Ampar		11187
		1. Tanjung Sengkuang	3787
		2. Sungai Jodoh	2161
		3. Batu Merah	3792
		4. Kampung Seraya	1447
<b>9</b>	Batam Kota		38964
		1. Teluk Tering	5890
		2. Taman Baloi	4065
		3. Sukajadi	3374
		4. Belian	17683
		5. Sungai Panas	2991
		6. Baloi Permai	4960
<b>10</b>	Sagulung		54780
		1. Tembesi	30512
		2. Sungai Binti	5356
		3. Sungai Lekop	3723
		4. Sagulung Kota	1933
		5. Sungai Langkai	3983
		6. Sungai Pelunggut	9271
<b>11</b>	Batu Aji		41337
		1. Bukit Tempayan	1738
		2. Buliang	2789
		3. Kibing	14535
		4. Tanjung Uncang	22274
<b>12</b>	Bengkong		13214
		1. Bengkong Laut	1829
		2. Bengkong Indah	1999
		3. Sadai	6326
		4. Tanjung Buntung	4060

Sumber: BPS (2015), data diolah.

Wilayah Kota Batam seperti halnya kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/ Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan.

Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Ada 22 sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

Permukaan dengan elevasi 0 – 5 m diatas permukaan laut banyak terdapat di pantai utara dan selatan dan pada umumnya berupa kawasan hutan bakau (mangrove). Sekitar 51% dari luas pulau memiliki elevasi 5 – 25 m diatas permukaan laut. Daerah ini sebagian besar berbentuk medan daratan alluvial dan sesuai untuk pemukiman, industri dan pariwisata. Lahan dengan elevasi 25 – 100 m diatas permukaan laut meliputi 32% dari

seluruh luas pulau. Kawasan ini sesuai untuk pemukiman, industri dan pariwisata serta hutan lindung untuk daerah dengan elevasi mendekati 100 m diatas permukaan laut. Sedangkan ketinggian diatas 100 m memiliki luasan sekitar 1%.

Program kependudukan di Kota Batam seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi, pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983.

Laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8,1 persen. Penduduk Kota Batam berdasarkan data BPS menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2016 tercatat sebesar 1.236.399 jiwa terdiri atas 631.338 jiwa laki-laki dan 605.061 jiwa perempuan dengan sex ratio 104,34. Dari jumlah penduduk tersebut tersebar di dua belas kecamatan dan 64 kelurahan. Hanya penyebarannya tidak

merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> di daerah ini bervariasi.

**Tabel 2.2. Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2011-2016**

No	Kecamatan	2016		
		Penduduk Kota Batam (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belakang Padang	9 673	9 556	19 229
2	Bulang	5 246	4 678	9 924
3	Galang	8 412	7 311	15 723
4	Sungai Beduk	37 185	49 506	86 691
5	Sagulung	43 048	43 145	86 193
6	Nongsa	131 131	111 224	242 355
7	Batam Kota	90 564	82 915	173 479
8	Sekupang	33 362	29 771	63 133
9	Batu Aji	33 983	31 352	65 335
10	Lubuk Baja	121 954	121 998	243 952
11	Batu Ampar	63 757	60 408	124 165
12	Bengkong	53 023	53 197	106 220
<b>Kota Batam</b>		<b>631 338</b>	<b>605 061</b>	<b>1 236 399</b>

Sumber: BPS (2011-2016), data diolah.

### 2.1.2. Sejarah Kota Batam

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Provinsi Riau yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru yang bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat Administratif yang kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya. Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam

yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literature sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu.

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles dari kerajaan Inggris telah melakukan "Barter" dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat sebagai Residen Riau atas nama Sultan Abdul Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau Taklukannya. Atas Dasar peristiwa sejarah tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Batam melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada tanggal 18 Desember 2015 akan berumur 186 tahun.

Luas wilayah Kotamadya Batam pada waktu itu lebih kurang 1.647,83 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km<sup>2</sup> dan daratan 612,53 Km<sup>2</sup>, sedangkan banyaknya pulau yang berada pada wilayah Kotamadya Batam pada waktu itu berjumlah 186

pulau dimana 80 pulau telah dihuni dan 106 pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km<sup>2</sup>, Pulau Bulan dan Kepala Jeri. Karena wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/ keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang.

Melalui modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI (program Pemerintah saat itu), maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, pergudangan dan basis logistic serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodesasi Pimpinan/ Pengembangan Otorita Batam sebagai berikut:

## 1. Tahun 1969- 1975

Pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan ketua Otorita Batam DR. IBNU SUTOWO, diantara periode tersebut telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain:

- a. Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.
- b. Kepres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Kepres No. 41 tahun 1973 tanggal 22 November 1973; Tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri. Lalu pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded Ware House.

## 2. Tahun 1975–1978

Pada periode ini dititikberatkan untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina, dengan ketua Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin. Dalam periode ini telah keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.
- c. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan Oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

- d. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
- e. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah Bonded Ware House.

### 3. Tahun 1978–1983

Pada periode ini pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain: a. Kepres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof. DR. Ing. B J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana. b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian. c. Keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No.70/KP/I/1983 tanggal 19 Januari

1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi. d. KEPRES No. 15 tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

#### 4. Tahun 1983 sampai sekarang

Pada periode ini dilakukan penanaman modal dan industri serta pengembangannya. Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana- prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moimoi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan periodisasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah "KOTAMADYA BATAM" berdasarkan PP No. 34 tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu: Belakang Padang, Batam Barat dan

Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal; 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KEPRES No. 7 tahun 1984 tentang: hubungan kerja antara Kota-madya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES No. 7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut:

Pasal 2, menyebutkan: Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

Pasal 3 huruf F, menyebutkan: Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984-1989. Pada Oktober tahun 1989 ditunjuk Walikota Madya Batam yang

kedua Drs. R. A. Aziz yang menjabat sampai dengan tahun 1999.

5. Tahun 1992

Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115 % dari luas Singapura).

6. Tahun 1998

Tahun ini merupakan periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth Abdullah.

7. Tahun 1999 (Otonomi Daerah)

Implementasi Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2000, maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai kewenangan terhadap 24 urusan

wajib dan 8 urusan pilihan sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Untuk itu, struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Tahun 2007 (Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).

Sejak diterbitkan UU 44 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, era baru dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi makin bebas dan terbuka. Implementasi UU ini melalui PP 46 tahun 2007 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.. Dengan dijadikannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diharapkan dapat meningkatkan investasi, menambah keunggulan kompetitif produk ekspor, peningkatan penerimaan devisa, membuka lapangan kerja serta mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batam.

### **2.1.3. Visi dan Misi Kota Batam**

#### **Visi**

**“Terwujudnya Batam menuju Bandar Dunia yang Madani dan Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional”**

Visi diatas memberikan pemahaman sebagai berikut:

1. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang dengan pesat dimasa mendatang yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak dan posisi yang strategis maupun daya dukung yang merupakan salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia.
2. Bandar dunia bermakna pengembangan dan pembangunan Kota Batam diarahkan sebagai Kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di

kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis domestik dan manca negara. Dalam jangka panjang, pengembangan Kota Batam diupayakan menjadi sebuah kata jasa yang merupakan “*center of excellent*”, dengan lebih melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi awal kewilayahan, sebagai sebuah kota dagang, Kota pariwisata dan Kota alih kapal serta Kota industri yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

3. Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.
4. Pilar / tiang pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah meliputi peranan ulama atau ahli ilmu yang konsisten, umaroh yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.
5. Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional artinya Kota Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bertumpu pada keunggulan *comparative* sebagai kota

perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.

6. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional nantinya, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi.

### **Misi**

1. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi (IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang didukung

oleh iklim / situasi usaha yang kondusif berlandaskan supremasi hukum

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga
5. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti
6. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

#### **2.1.4. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam**

##### **Visi dan Misi**

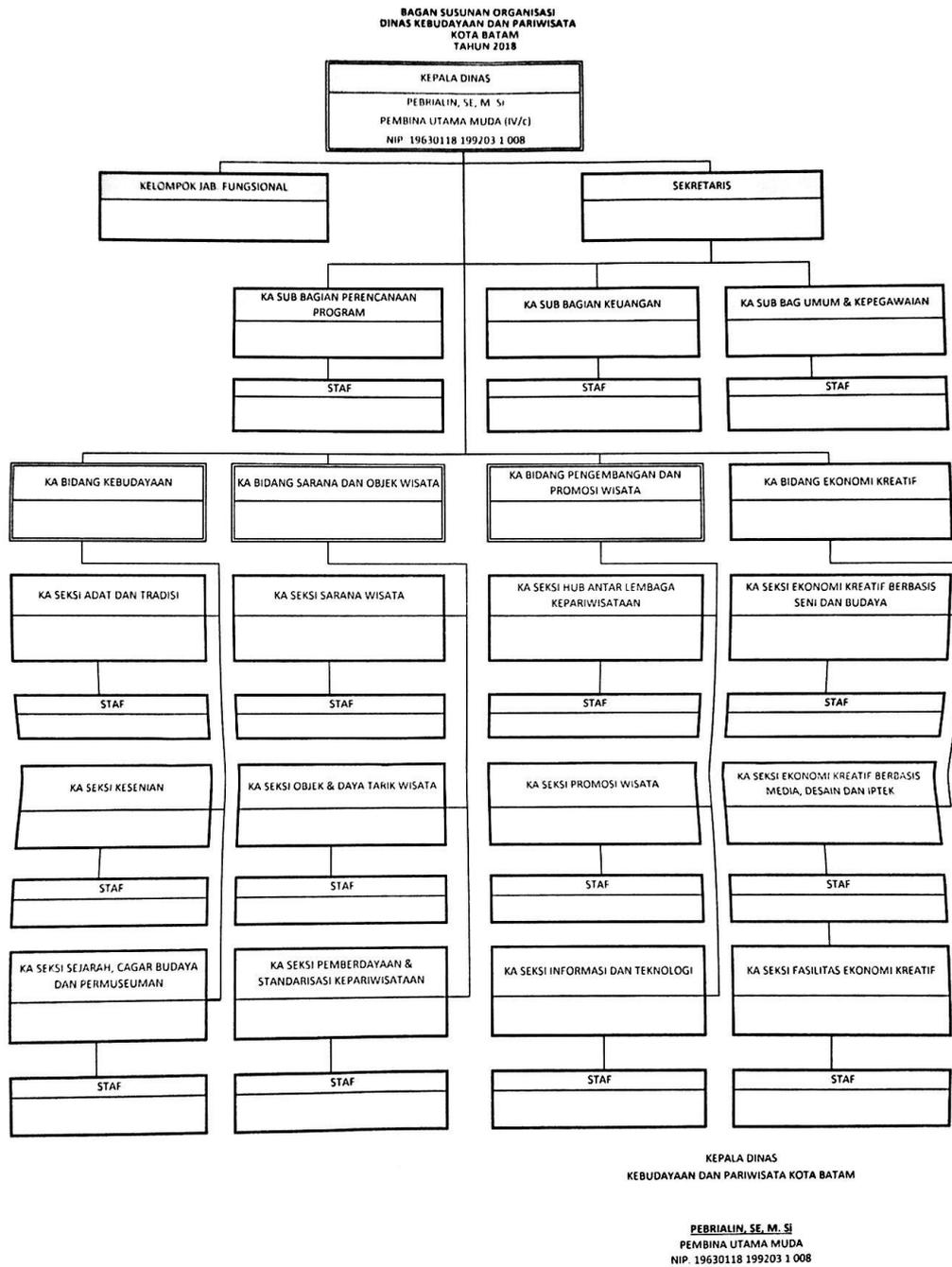
##### **Visi**

**“Terwujudnya Batam Sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Bangun Bangsa & Menjadi Pintu Gerbang Pariwisata Indonesia Bagian Barat”**

##### **Misi**

1. Melestarikan Nilai serta Mengembangkan Keragaman dan Kekayaan Budaya Bangsa dengan tetap menjadikan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia serta pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan
3. Mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, Destinasi yang unggul serta Pemasaran dan Promosi Pariwisata yang berkelanjutan.

## 2.1.5. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam



### **2.1.6. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam sesuai dengan Perwako (2012) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang sarana dan obyek wisata, bidang

pengembangan dan promosi wisata, bidang seni budaya dan sejarah;

5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.